SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KELOMPOK TANI DI DESA HIBUN KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Program Studi Administrasi Publik
Kajian Mnajemen Publik

Oleh:

Ariana Anggraeni
NIM. E1011211055

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KELOMPOK TANI DI DESA HIBUN KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

Ariana Anggraeni
NIM: E1011211055

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KELOMPOK TANI DI DESA HIBUN KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Tanggung jawab Yuridis Pada:

Ariana Anggraeni
NIM: E1011211055

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si **Tanggal:** 04-08-2025
NIP. 19601114987031003

Dosen Pembimbing Pendamping

Bima Sujendra, S.IP, M.Si **Tanggal:** 05-08-2025
NIP. 198805072014041002

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KELOMPOK TANI DI DESA HIBUN KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Oleh
Ariana Anggraeni
NIM: E1011211055

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 02

Tim Penguji:

Ketua

Dr. S.Y Pudjianto, M.Si
NIP.196011141987031003

Sekretaris

Bima Sujendra, S.IP. M.Si
NIP. 198805072014041002

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Martoyo. MA
NIP. 196010031986031004

Penguji Pendamping

Drs. Asmadi. M.Si
NIP.196202041988101001

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos. M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Ariana Anggraeni: Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Kelompok Tani Di Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemerintah desa menjalankan peran-perannya dalam kegiatan pemerintahan desa melalui pengelolaan kelompok tani di Desa Hibun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus utama penelitian berada pada peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mengelola kelompok tani agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan responsif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengelolaan kelompok tani di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini tampak dari beberapa aspek: (1) Masih kurangnya keterlibatan kelompok tani dalam forum musyawarah desa. (2) Distribusi bantuan pertanian belum merata akibat lemahnya pendataan kelompok tani. (3) Pelaksanaan pelatihan pertanian belum menyentuh seluruh kelompok secara adil karena koordinasi dan komunikasi belum konsisten. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pemerintah desa perlu memperjelas mekanisme kebijakan, memperbaiki sistem pencatatan kelompok tani, serta memperluas jangkauan informasi dan komunikasi kepada seluruh kelompok tani. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan kelompok tani dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani di Desa Hibun.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Kelompok Tani, Regulasi, Partisipasi, Pengelolaan.

ABSTRACT

Ariana Anggraeni: The Role of Village Government in Managing Farmer Groups in Hibun Village, Parindu District, Sanggau Regency. Faculty of Social and Political Science, Tanjungpura University, Pontianak 2025.

This study examines the management of farmer groups in Hibun Village as a means of assessing how the village administration fulfills its administrative responsibilities. Adopting a qualitative methodology combined with a descriptive approach, the research emphasized the village government's role as facilitator, motivator, and regulator in supervising farmer groups to promote responsive and participatory governance. The findings reveal that farmer group management has not yet been fully realized at the village level. This is reflected in several aspects: (1) farmer groups have not been actively involved in village deliberation forums; (2) the lack of comprehensive data collection on agricultural support has resulted in inequitable distribution; and (3) inconsistent coordination and communication have prevented all groups from equally benefiting from agricultural training initiatives. To improve management quality, the village administration needs to strengthen its farmer group data system, clarify policy mechanisms, and expand communication and information outreach to all groups. These measures are expected to enhance the effectiveness of farmer group management and contribute to improving the livelihoods of farmers in Hibun Village.

Keywords: farmer groups, village government, management, participation, regulation

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Desa Hibun dalam Pengelolaan Kelompok Tani di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau". Judul ini diangkat karena masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan kelompok tani di Desa Hibun, seperti belum optimalnya pencatatan kelompok tani, distribusi bantuan yang tidak merata, serta pelatihan yang belum menjangkau seluruh kelompok secara adil. Permasalahan tersebut berdampak pada keterbatasan kapasitas petani dalam mengembangkan usahanya dan berimplikasi pada lambatnya proses pemberdayaan kelompok tani.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan kelompok tani, yang difokuskan pada tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan secara mendalam bentuk pelaksanaan ketiga peran tersebut dalam konteks nyata di lapangan, serta sejauh mana peran tersebut berkontribusi terhadap upaya pemberdayaan petani.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, ketua kelompok tani, anggota kelompok, dan penyuluh pertanian. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan kelompok tani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran regulator belum sepenuhnya optimal karena regulasi pengelolaan kelompok tani belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Hal ini berdampak pada pendataan, pembinaan, serta penyaluran bantuan yang masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya transparan maupun merata, sehingga belum mendukung pemberdayaan petani secara berkelanjutan. Peran dinamisator terlihat melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan, seperti budidaya cabai, pola tanam, pembuatan pupuk organik, dan pengendalian hama. Kegiatan ini memberi dampak positif pada peningkatan keterampilan petani, yang merupakan bagian dari proses pemberdayaan, tetapi manfaatnya belum merata karena sebagian kelompok masih belum terlibat secara aktif. Sementara itu, peran fasilitator sudah terlihat melalui bantuan sarana produksi, penghubung dengan penyuluh, serta usulan bantuan ke dinas terkait. Meski demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan informasi, kurangnya kelengkapan administrasi, dan persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan yang menghambat pemerataan manfaat bagi semua kelompok tani.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya dalam pengelolaan kelompok tani, namun pelaksanaannya belum menyeluruh dan merata. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat dasar hukum melalui Perdes, memperluas cakupan program pelatihan, serta meningkatkan perannya dalam fasilitasi dan koordinasi agar setiap kelompok tani memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. juga mengarah pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ariana Anggraeni
Nomor Mahasiswa	: E1011211055
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun. Sepengetahuan saya, dalam penyusunan skripsi ini tidak terdapat unsur plagiarisme maupun kutipan dari karya atau pendapat orang lain yang tidak dicantumkan secara jelas. Seluruh kutipan yang digunakan telah dicantumkan sumbernya dalam isi naskah serta tercantum dalam daftar pustaka.

Pontianak, 15 Juli 2025

Ariana Anggraeni
E1011211055

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Bersukacitala Dalam Pengharapan, Sabarlah Dalam Kesesakan, dan Bertekunlah Dalam Doa”
(Roma 12:12)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moril dalam setiap langkah peneliti hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan FISIP UNTAN yang telah membimbing dan mendukung peneliti selama proses penyusunan skripsi, terutama kepada Bapak Dr. S.Y Pudjianto, M.Si sebagai pembimbing pertama, Bapak Bima Sujendra, S.IP, M.Si sebagai pembimbing kedua, Bapak Prof. Dr. H. Martoyo, MA dan Bapak Drs. Asmadi, M.Si sebagai dosen pembahas, serta Bapak Dr. Erdi, M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen dan staf FISIP UNTAN atas ilmu dan bimbingan yang begitu berarti.
3. Rekan-rekan seperjuangan di FISIP UNTAN yang telah banyak membantu, menyemangati, dan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta berbagai masukan dan saran berharga selama penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Kelompok Tani Di Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi di Program Studi Administrasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsinya dalam pengelolaan kelompok tani, khususnya melalui peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan tersebut.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si selaku pembimbing utama, serta Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan proposal ini.

3. Seluruh dosen dan staf di Program Studi Administrasi Publik, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan, saran, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Pontianak, 15 Juli 2025

Ariana Anggraeni
E1011211055

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 14
1.3 Fokus Penelitian 14
1.4. Rumusan Masalah 15
1.5. Tujuan Penelitian 15
1.6. Manfaat Penelitian 15
1.6.1. Manfaat Teoritis 15
1.6.2. Manfaat Praktis 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA **17**
2.1 Definisi Konsep 17
2.1.1 Definisi Peran 17
2.1.2. Pemerintahan Desa 18
2.1.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa 20
2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat 22
2.1.5 Kelompok Tani 27
2.2. Teori 29
2.2.1. Peran Pemerintah 29
2.3. Hasil Penelitiaan Yang Relevan 37

2.4. Alur Pikir Penelitian 39
2.5. Pertanyaan Penelitian 43
BAB III METODE PENELITIAN 44
3.1 Jenis Penelitian 44
3.2. Langkah-langkah Penelitian 45
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 47
3.4.1. Subjek Penelitian 47
3.4.2. Objek Penelitian 49
3.5. Teknik Pengumpulan Data 49
3.6. Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 52
3.7. Analisis Data 53
3.7.1. Keabsahan Data 53
3.7.2. Teknik Analisis Data 56
BAB IV GAMBARAN UMUM 59
4.1. Sejarah Desa 59
4.2. Kondisi Geografis 60
4.2.1. Letak Wilayah 60
4.2.2. Luas Wilayah 61
4.2.3. Pembagian Wilayah Administratif 61
4.3 Pemerintahan 62
4.3.1 Struktur Pemerintahan Desa Hibun 62
4.3.2 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Hibun 63
4.3.3 Visi dan Misi Desa Hibun 66
4.4 Demografis 67
4.4.1 Jumlah Penduduk 67
4.4.2 Jumlah Suku 69
4.4.3 Jenis Pekerjaan 71
4.5 Sarana dan Prasarana 73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 75

5.2 Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator 79
5.3 Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator 88
5.3. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator 105
BAB VI PENUTUP 124
6.1. Simpulan 124
6.2. Saran 125
6.3. Keterbatasan Penelitian 127
DAFTAR PUSTAKA 129
LAMPIRAN 132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Nama Dan Ketua Kelompok Tani Di Desa Hibun 5
Tabel 1. 2 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat..... 9
Tabel 1. 3 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Hibun..... 12
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian..... 47
Tabel 4. 1 Nama-Nama Kepala Desa Hibun..... 60
Tabel 4. 2 Jumlah RT Dan RW Tiap Dusun Yang Ada Di Desa Hibun..... 61
Tabel 4. 3 Daftar Nama Perangkat Desa Hibun..... 63
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Desa Hibun..... 68
Tabel 4. 5 Jumlah Suku..... 69
Tabel 4. 6 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Hibun..... 71
Tabel 4. 7 Sarana Dan Prasarana..... 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1 Jumlah Usaha Pertanian dan Jenis Usaha Pertanian. 8
Gambar1. 2 Penyerahan Alsintan dari Kementerian Pertanian..... 9
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian…….42
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hibun 62
Gambar 5. 1 Proses Pengemasan Hasil Panen Dan Pencatatan Anggota Kelompok Yang Membeli Hasil Panen 92
Gambar 5. 2 Sosialisasi Pertanian yang Dilakukan Oleh Kepala Desa 104
Gambar 5. 3 Bantuan Bibit Jagung Oleh Pemerintah Desa Hibun 107
Gambar 5. 4 Pelatihan Oleh Pemerintah Desa Hibun Untuk Anggota Poktan ... 109
Gambar 5. 5 Surat Pemberitahuan Sosialisasi Oleh Instansi Terkait..... 111
Gambar 5. 6 Bantuan yang Diberikan Pemerintah Kepada Masyarakat..... 114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:Pedoman Wawancara 132
Lampiran 2:Biodata..... 134
Lampiran 3:Dokumentasi..... 135
Lampiran 4: Surat Tugas Penelitian..... 140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bagian mendasar dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan dan membina masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menekankan pentingnya desa sebagai wujud pemerintahan yang mandiri dan partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas tersebut mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, pelayanan yang berkualitas, serta berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks inilah, tindakan pemerintah desa dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat menjadi bagian dari upaya pemenuhan fungsi pemerintahan yang profesional, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk pengelolaan yang menjadi perhatian dalam pemerintahan desa adalah pengelolaan kelompok tani. Kelompok tani merupakan wadah kolektif bagi petani desa yang berfungsi tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan sektor pertanian. Dalam praktiknya, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengatur, membina, dan memfasilitasi kelompok tani sebagai bagian dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Pengelolaan kelompok tani oleh pemerintah desa dapat dipandang sebagai bentuk nyata pelaksanaan tugas pemerintahan desa di bidang pertanian. Melalui kegiatan seperti penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi bantuan pertanian, serta koordinasi antaranggota kelompok, pemerintah desa menjalankan peran strategis dalam meningkatkan efektivitas kelompok tani. Dengan kata lain, pengelolaan kelompok tani tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah desa menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan di Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pengelolaan kelompok tani belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Data lapangan mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Misalnya, belum adanya regulasi tertulis (seperti Peraturan

Desa) yang menjadi pedoman formal dalam pengelolaan kelompok tani mengakibatkan kelembagaan tani tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan belum didukung oleh administrasi yang rapi.

Pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang berada pada garis terdepan pelayanan publik. Desa memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan penuh untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas untuk membina nilai sosial budaya masyarakat, memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, serta mengelola sumber daya desa secara efektif dan efisien. Kepala desa juga memiliki kewajiban untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran Pemerintah Desa Hibun sebagai regulator belum dilengkapi dengan regulasi tertulis seperti Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar hukum pengelolaan kelompok tani. Akibatnya, kelembagaan kelompok berjalan tanpa landasan hukum yang jelas,

dan masih terdapat ketidakteraturan dalam pendataan serta pencatatan administrasi kelompok.

Dalam hal peran dinamisator, pemerintah desa belum secara konsisten melakukan pembinaan dan penggerakan kepada kelompok tani. Kegiatan masih sangat bergantung pada inisiatif internal kelompok, khususnya ketua kelompok yang aktif, sementara kehadiran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan perangkat desa dalam pembinaan masih minim.

Adapun peran sebagai fasilitator juga belum maksimal karena distribusi bantuan tidak menjangkau seluruh kelompok tani. Banyak kelompok tidak terdata dalam sistem sehingga tidak mendapatkan alat atau bantuan pertanian yang dibutuhkan. Koordinasi dengan pihak pendamping juga belum terjalin secara efektif.

Di Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dalam konteks ini, keberadaan kelompok tani menjadi sangat penting sebagai media untuk mengorganisir para petani dalam menerima bantuan, pelatihan, dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan kelompok tani masih menghadapi tantangan. Koordinasi antara pemerintah desa dan kelompok tani belum berjalan secara optimal. Banyak program pertanian yang tidak melibatkan kelompok tani secara langsung dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara bantuan yang

diberikan dan kebutuhan yang sebenarnya. Kelompok tani sering kali hanya dijadikan objek penerima manfaat tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa.

Di Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, kelompok tani menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan pertanian desa. Sebagai bentuk kelembagaan masyarakat, kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai wadah petani, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam pengelolaan bantuan pertanian, peningkatan produktivitas, serta partisipasi dalam pembangunan desa berbasis pertanian. Namun, pengelolaan kelompok tani di desa ini masih menghadapi sejumlah tantangan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan kelompok tani belum berjalan secara optimal. Koordinasi antara pemerintah desa dan kelompok tani masih lemah, keterlibatan dalam perencanaan program pertanian kurang, serta efektivitas distribusi bantuan dan pelatihan belum sesuai harapan masyarakat tani.

Tabel 1. 1
Daftar Nama Dan Ketua Kelompok Tani Di Desa Hibun

No.	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Alamat Dusun	Tahun Pembentukan
1.	Usaha Bersama	Kardianus Adi	Musan	2013
2.	Bangun Humo	Daniel	Musan	2013
3.	Baoh Bojalant	Mulyadi	Bansu	2016
4.	Mina Fortuna	Herianus Heryanto	Serosat	2024
5.	Bosamoh Maju	Pius Nado	Sedoya	2024
6.	Bongo Jaya	Hironimus Antap	Serosat	2024
7.	Maju Usaha	Eli	Serosat	2023
8.	Miyok Tocak	Sera Maya	Engkalet	2022
9.	Lino Sejahtera	Albertus Hendra	Tunas Lino	2022
10.	Lino Jaya	Markus Mundus	Musan	2022

No.	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Alamat Dusun	Tahun Pembentukan
11.	Lino Mandiri	Rudi Hartono Ansal	Tunas Lino	2022
12.	KWT Katus	Anastasia Demi	Sedoya	2022
13.	Tuah Serumpun 2	Lazarus Laten	Mawang	2022
14.	Lobak Buae	Arderias Mino	Engkalet	2022
15.	Tunas Baru 2	Yulianus Dodi	Engkalet	2022
16.	Kihijo Busamoh	Antonius	Serosat	2022
17.	Tunas Baru 1	Fatrianus Akon	Engkalet	2021
18.	Jamang Permai	Alin	Engkalet	2021
19.	Busamoh Bugiat	Lutin Luter	Engkalet	2019
20.	Owang Tigit	Antonius Nius	Sedoya	2016
21.	Kejar Usaha	Sumardi	Serosat	2016
22.	Tani Makmur	Marten Hansip	Musan	2021
23.	Tunas Muda	Petrus Wit Samoso	Bansu	2014
24.	Nian Maju	Martinus D.	Musan	2014
25.	Tuah Serumpun	Agustinus	Mawang	2010
26.	Makmur Jaya	Heriana	Musan	2021

Sumber: Kantor Desa Hibun

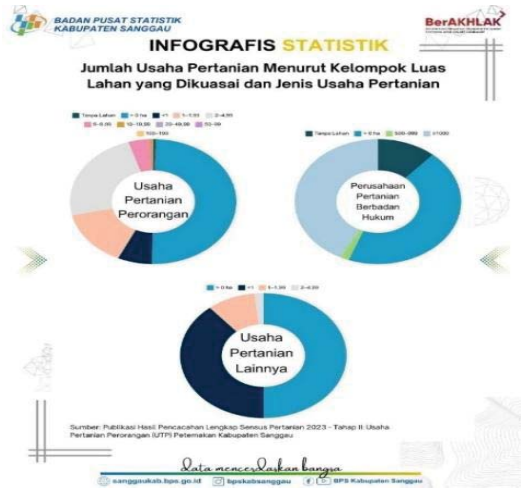
Berdasarkan data dari Sensus Pertanian 2023 (BPS Kabupaten Sanggau), mayoritas petani di Kecamatan Parindu masih mengelola lahan pertanian sempit, kurang dari 0,5 hektar. Selain itu, banyak petani yang belum tergabung dalam kelompok tani formal, sehingga akses mereka terhadap bantuan, pelatihan, maupun informasi pembangunan sangat terbatas. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian bahwa pemerintah desa belum secara aktif mendorong partisipasi petani dalam kelompok, yang berdampak pada ketidakterlibatan mereka dalam program bantuan atau pelatihan. Karena banyak petani belum tergabung secara resmi dalam kelompok, mereka tidak terorganisir dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap program pemerintah, bantuan, atau pelatihan. Padahal, untuk menerima bantuan seperti pupuk subsidi atau pelatihan dari dinas pertanian, status formal dan legal kelompok tani menjadi syarat utama. Ini menunjukkan bahwa peran

dinamisator pemerintah desa dalam mendorong petani bergabung masih sangat kurang.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sanggau tahun 2023, sektor pertanian di Kabupaten Sanggau didominasi oleh usaha pertanian perorangan. Sebanyak 82.298 usaha pertanian tercatat sebagai usaha perorangan, dengan mayoritas menggarap lahan kurang dari 5 hektar. Jumlah usaha pertanian perorangan yang menguasai lahan di bawah 1 hektar tercatat sebanyak 11.035 unit, sedangkan yang menguasai lahan antara 2-4,99 hektar mencapai 39.218 unit. Sementara itu, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum relatif sedikit dibandingkan dengan usaha pertanian perorangan. Data ini menunjukkan bahwa pertanian skala kecil masih menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Sanggau. Informasi ini penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat sasaran, khususnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani skala kecil.

Temuan-temuan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa pemerintah desa belum hadir secara menyeluruh sebagai penggerak, pembina, dan pendukung kelompok tani. Padahal, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Hibun yang didominasi oleh petani menunjukkan bahwa sektor pertanian seharusnya menjadi prioritas utama dalam program desa.

Gambar1. 1
Jumlah Usaha Pertanian dan Jenis Usaha Pertanian.



Sumber: Facebook.com/BPS Kab. Sanggau

Padahal, pada April 2025, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian, termasuk 71 unit pompa air, 4 unit traktor roda empat, 17 unit traktor roda dua, 271 unit hand sprayer elektrik, dan 5 unit rice transplenter. Namun, masih ditemukan kelompok tani yang tidak menerima bantuan karena tidak tercatat dalam sistem. Meskipun pemerintah daerah sudah menyalurkan banyak bantuan, nyatanya tidak semua kelompok tani mendapatkannya karena masalah administrasi: tidak terdata atau tidak dimasukkan ke sistem. Ini menunjukkan lemahnya peran pemerintah desa dalam mendata dan mengadvokasi kelompok tani agar semua bisa tercakup.

Tidak tercatat dalam sistem berarti kelompok tani tidak masuk dalam database resmi sebagai penerima manfaat program bantuan, akibat lemahnya pendataan dan pembinaan oleh pemerintah desa. Padahal, mereka aktif dan

membutuhkan dukungan. Ini menunjukkan belum optimalnya peran desa sebagai fasilitator dalam memastikan bantuan pertanian tepat sasaran.

Gambar1. 2
Penyerahan Alsintan dari Kementerian Pertanian



Paotus Hadi menyerahkan bantuan alat mesin dan pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian ke Pemerintah Kabupaten Sanggau di halaman kantor Bupati Sanggau, Rabu (09/04/2025).

Sumber: suarakalbar.co,id/1st

Selain itu, rendahnya keterlibatan kelompok tani dalam musyawarah desa (Musdes) menunjukan belum optimalnya peran pemerintah desa dalam mendorongpartisipasi aktif masyarakat tani dalam pengambilan keputusan. Padahal, menurut Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2020, Musdes merupakan forum pengambilan keputusan strategis yang harus melibatkan unsur masyarakat, termasuk kelompok tani, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan lokal dan aspirasi petani.

Tabel 1. 2
Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyak/ Jumlah
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a) Bidang Sosial Budaya	-
		b) Bidang Ekonomi	2 Kali
		c) Bidang Politik	-
		d) Bidang Lingkungan Hidup	6 Kali
2.		a) Pemberdayaan Keluarga	1 Kali

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyak/ Jumlah
	Pemberdayaan Masyarakat	b) Pemberdayaan Pemuda	3 Kali
		c) Pemberdayaan Olah Raga	2 Kali
		d) Pemberdayaan Karang Taruna	1 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a) Bidang Pendidikan	2 Kali
		b) Bidang Kesehatan	4 Kali

Sumber: Kantor Desa Hibun, 2024

Tabel 1.2 menggambarkan pelaksanaan program kerja pemberdayaan masyarakat di Desa Hibun sepanjang tahun 2024. Jika ditinjau melalui perspektif pemberdayaan kelompok tani, terdapat beberapa indikasi lemahnya perhatian dan pendekatan strategis pemerintah desa terhadap sektor pertanian, khususnya dalam hal sosialisasi, pelatihan, dan partisipasi petani sebagai bagian dari kelompok tani.

a) Minimnya Sosialisasi dan Motivasi yang Menyentuh Kelompok Tani

Dalam sub bidang “Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat”, bidang ekonomi hanya dilaksanakan 2 kali, dan tidak ada kegiatan sama sekali di bidang sosial budaya dan politik. Padahal, sosialisasi bidang ekonomi seharusnya menjadi ruang utama untuk membina kelompok tani dalam hal pemasaran hasil pertanian, penguatan kelembagaan tani, hingga penyadaran peran kelompok tani dalam pembangunan desa.

Ketidakhadiran kegiatan ini di bidang sosial budaya juga melemahkan solidaritas internal petani dan nilai gotong royong yang semestinya menjadi ciri khas kelompok tani.

b) Pemberdayaan Tidak Menyasar Kelembagaan Petani

Kegiatan pemberdayaan lebih banyak diarahkan pada pemuda, olahraga, dan karang taruna. Sayangnya, tidak ada kegiatan spesifik yang diarahkan pada kelompok tani sebagai kelembagaan masyarakat ekonomi pedesaan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi penekanan pada penguatan kewenangan desa, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan berbasis potensi lokal (termasuk sektor pertanian). Pemberdayaan keluarga yang hanya dilakukan 1 kali pun tidak secara eksplisit menyasar keluarga petani. Ketiadaan kegiatan yang langsung menyentuh petani membuat pemerintah desa terkesan belum melihat kelompok tani sebagai subjek strategis pemberdayaan.

c) Partisipasi Petani dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tidak Terpantau

Bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi bagian dari penggalangan partisipasi masyarakat masing-masing dilakukan 2 dan 4 kali. Namun, tidak diketahui apakah kelompok tani juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Minimnya pelibatan petani dalam kegiatan lintas bidang seperti pendidikan pertanian, pelatihan gizi keluarga petani, atau sosialisasi kesehatan kerja di lahan menunjukkan masih belum terintegrasinya kebutuhan petani dalam kegiatan pembangunan sosial desa.

d) Rendahnya Keberlanjutan dalam Kegiatan Ekonomi Pedesaan.

Kegiatan ekonomi hanya dilakukan 2 kali dan tidak dijelaskan bentuk atau keberlanjutannya. Jika kegiatan ini berkaitan dengan pelatihan keterampilan bertani, penguatan pasar tani, atau manajemen kelompok tani,

maka frekuensi tersebut tergolong sangat rendah. Tanpa program berkelanjutan yang rutin dan terfokus pada petani, mustahil mewujudkan kelompok tani yang mandiri dan profesional.

Tabel 1. 3
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Hibun

No.	Status Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	765
2.	Aparatur Pejabat Negara	45
3.	Tenaga Pengajar	8
4.	Wiraswasta	173
5.	Pertanian dan Peternakan	766
6.	Nelayan	1
7.	Agama dan Kepercayaan	2
8.	Pelajar dan Mahasiswa	592
9.	Tenaga Kesehatan	1
10.	Pensiunan	8
11.	Pekerjaan Lainnya	773
12.	Pekerjaan Lainnya	192

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2024

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sanggau menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Hibun bekerja di sektor perkebunan dan pertanian, tetapi tingkat partisipasi mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa masih rendah. Masalah yang perlu diteliti adalah bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan kelompok tani dapat mempengaruhi manajemen publik di Desa Hibun.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raintung, Sambiran, dan Sumampow (2021) di Desa Mobuya mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani belum terlaksana secara maksimal. Meskipun telah dilakukan pembentukan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan

pemberian penyuluhan melalui pendamping lapangan, namun belum disertai dengan penguatan aturan atau strategi jangka panjang. Hambatan juga muncul dalam proses pembagian bantuan yang tidak merata serta rendahnya partisipasi petani dalam pelatihan.

Penelitian lain oleh Hajra Ramli, Amir Muhiddin, dan Muh Yusuf (2023) di Desa Tawakua menunjukkan hal serupa, yaitu bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator telah berjalan melalui penyediaan pelatihan dan bantuan sarana pertanian. Akan tetapi, pelibatan petani dalam proses pembangunan masih kurang karena lemahnya dukungan motivasional dan penggerakan masyarakat untuk ikut aktif dalam program-program desa.

Temuan-temuan dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan kelompok tani tidak hanya terjadi secara lokal, melainkan merupakan fenomena yang juga ditemukan di berbagai wilayah. Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan fungsi pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu mendorong keterlibatan masyarakat tani secara aktif.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengelolaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa Hibun dilaksanakan, serta menganalisis pelaksanaan peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran faktual tentang efektivitas, kendala, dan potensi perbaikan dalam tata

kelola kelompok tani sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih responsif dan inklusif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ditemukan identifikasi masalah yaitu:

1. Belum optimalnya pengaturan dan pencatatan kelompok tani oleh pemerintah desa, sehingga sebagian kelompok tidak tercatat secara resmi dan berdampak pada distribusi bantuan yang tidak merata.
2. Pelaksanaan pelatihan pertanian belum menjangkau seluruh kelompok tani, karena pemerintah desa cenderung memfokuskan kegiatan pada kelompok tertentu yang lebih aktif atau dikenal.
3. Masih rendahnya keterlibatan petani dalam kelompok tani formal, sehingga banyak petani yang kesulitan mengakses pelatihan, bantuan, dan informasi dari pemerintah.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada aspek tertentu untuk memastikan bahwa pembahasan tetap terarah sesuai dengan tujuan penelitian, mengingat bahwa konsep peran pemerintah memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pengelolaan kelompok tani di Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kelompok tani di Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat desa?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa menjalankan perannya dalam pengelolaan kelompok tani di Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan peran tersebut dan kendala yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian tentang fungsi pemerintahan desa dalam mengelola kelembagaan masyarakat di sektor pertanian. Dengan mengangkat isu pengelolaan kelompok tani, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat lokal. Hasil

penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas pengelolaan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat.

1.6.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Desa Hibun

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Hibun untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan kelompok tani. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan dalam memperbaiki koordinasi antara perangkat desa dan kelompok tani, merancang program pertanian yang lebih terarah, serta memperkuat dukungan pemerintah desa terhadap keberlanjutan kelompok tani.

b) Bagi Masyarakat Desa Hibun

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, khususnya petani, dalam aktivitas kelompok tani. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan kelompok, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan kelompok tani, serta memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan bersama.